

**PENINDAKAN TERHADAP DOKTER PRAKTIK TANPA MEMILIKI
SURAT IZIN PRAKTIK**

**(Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten
Pasuruan)**

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BAGOES PRASETYA ARIBAWA

NIM. 0910110124



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**PENINDAKAN TERHADAP DOKTER PRAKTIK TANPA MEMILIKI
SURAT IZIN PRAKTIK**

**(Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten
Pasuruan)**

Bagoes Prasetya Aribawa

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: bagoesprasetya13@gmail.com

ABSTRAKSI

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan penindakan terhadap dokter praktik tanpa memiliki surat izin praktik. Pemilihan permasalahan tersebut dilatar belakangi banyaknya dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik (SIP) yang cenderung meningkat jumlahnya di tiap tahunnya di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa dokter yang melakukan praktik tanpa SIP tersebut tidak ditangani oleh pengadilan, melainkan cukup oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). Di mana MKEK-lah yg akan memberikannya sanksi. Jika MKEK tidak dapat menanggulangi kasus ini, akan diteruskan ke P3EK (Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran). Dengan kata lain pelaksanaan pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran belum efektif.

Kata kunci: Dokter, Praktik Kedokteran, Surat Izin Praktik, Etik Kedokteran

ABSTRACT

The author considers as research problem the measures taken against the practice physicians without practice license. The background of this selected problem is that many practice physicians are without practice license (SIP – *Surat Ijin Praktek*) and the number of such illegal physicians is increasing every year at Pasuruan District. Research type is empiric with sociological juridical method. Result of research shows that practice physicians without SIP are not dealt with court verdict but only by the measures taken by Ethic Honor Assembly of Medicine (MKEK – *Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*). Therefore, MKEK is one with authority to give sanction. If MKEK disregards the case, the case is submitted to The Committee of Advising and Fostering of Medicine Ethic (P3EK – *Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran*). In other words, the implementation of Article 76 of Act No. 29 of 2004 about Medicine Practice is not yet effective.

Keywords: Physicians, Medicine Practice, Practice License, Medicine Ethic

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat, yang dalam rangka pencapaiannya diwujudkan melalui proses pengembangan mutu dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. Dalam memberikan mutu pelayanan pada masyarakat luas membutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Negara Indonesia saat ini.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas

dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

Pemerintah mengharapkan semua tenaga kesehatan bisa memberikan mutu pelayanan kesehatan secara optimal tanpa adanya keterpaksaan dalam melaksanakan tugasnya, baik di sarana pelayanan Pemerintah, Swasta, maupun pelayanan praktik mandiri atau perorang yang pada umumnya dilaksanakan oleh dokter. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari Sumber Daya Manusia (dokter dan dokter gigi) maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Berkaitan dengan ini maka dibuatlah Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan, agar semua rakyat atau masyarakat tahu bahwa semua tenaga medis atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dengan peraturan Menteri.

Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada alinea di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹ Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat memberikan sanksi yaitu memberi rekomendasi cabut surat izin atau STR bagi dokter praktik tanpa memiliki surat izin kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain sanksi di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat mencabut izin fasilitas pelayanan kesehatan baik sementara atau tetap bagi dokter yang praktik tidak memiliki izin.

Tujuan perlu adanya Surat Izin Praktik bagi seorang dokter adalah, sebagai berikut:²

1. Perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik, mental, atau nyawa pasien.
2. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan lisensi atau legalitas.
3. Pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi & institusi yang ada.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penindakan terhadap Dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan?
2. Kendala atau kesulitan apakah yang terjadi dalam penindakan terhadap Dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *yuridis sosiologis*. Ketentuan dan peraturan yang

¹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

² Materi hasil rapat Dinas Kesehatan Provinsi

akan dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden. Data ini meliputi pendapat beberapa tenaga kesehatan yang berada di wilayah Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan.

b. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang meliputi sumber-sumber bacaan atau tulisan yang berkaitan dengan Surat Izin Praktik Dokter.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengambilan Data Primer

Diambil melalui wawancara langsung kepada responden dalam hal ini beberapa tenaga kesehatan yang berada di wilayah Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan.

b. Pengambilan Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan pustaka dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap Korban.

PEMBAHASAN

A. Realita Kasus Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik di Kabupaten Pasuruan.

Setiap dokter atau dokter gigi diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki surat izin praktik sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Kewajiban dokter ini semula adalah kewajiban hukum administrasi yang diangkat menjadi hukum pidana karena pelanggaran terhadap kewajiban itu diancam pidana.

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini, yakni tahun 2011 sampai 2013 dokter praktik yang di data oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Dokter Praktik di Kabupaten Pasuruan

No.	Tahun	Dokter	Jumlah Dokter	Memiliki Izin	Tanpa Izin	
					Belum Memiliki	Sudah Tidak Berlaku
1.	2011	Dokter Umum	130	96	15	19
2.		Dokter Gigi	60	40	6	14
3.		Dokter Spesialis	63	31	12	20
	Jumlah		253	167	33	53
4.	2012	Dokter Umum	187	108	22	57
5.		Dokter Gigi	64	31	12	21
6.		Dokter Spesialis	73	48	7	18
	Jumlah		324	187	41	96
7.	2013	Dokter Umum	217	169	22	27

8.		Dokter Gigi	85	76	4	5
9.		Dokter Spesialis	84	73	6	4
	Jumlah		386	318	32	36

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dokter yang melakukan praktik tanpa izin praktik baik dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dari tahun ke tahun tidaklah mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat. Dilihat dari tahun 2011 dokter yang tercatat belum mempunyai surat izin praktik berjumlah 33 dokter, sedangkan yang masa berlaku surat izinnya sudah habis berjumlah 53 dokter. Pada tahun 2012 dokter yang belum mempunyai surat izin praktik berjumlah 41 dokter, sedangkan yang masa berlaku surat izinnya sudah habis berjumlah 96. Dan pada tahun 2013 sampai bulan September, dokter yang belum mempunyai surat izin praktik berjumlah 33 dokter, dan yang masa berlaku surat izinnya sudah habis berjumlah 36 dokter.

Tabel 4.4
Faktor yang Mempengaruhi Dokter Melakukan Praktik Tanpa Izin

No.	Belum Memiliki Izin	Izin Sudah Tidak Berlaku
1.	Belum mendapat rekomendasi dari Organisasi Profesi IDI	Belum memperpanjang STR
2.	Belum lulus uji kompetensi	
3.	Belum memiliki STR	

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan uraian tabel di atas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Dokter melakukan Praktik Tanpa Izin, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum Memiliki Izin

a. Belum mendapat rekomendasi Organisasi Profesi IDI.

Jika seorang dokter tersebut belum menjadi anggota Organisasi Profesi IDI, maka dokter tersebut tidak bisa memperoleh sebuah rekomendasi dari Ketua IDI dimana rekomendasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai syarat melengkapi pengurusan STR.

b. Belum lulus uji kompetensi.

Setelah lulus dari pendidikan Kedokteran, seorang dokter harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Dimana hasil uji kompetensi ini juga digunakan sebagai salah satu syarat dalam melengkapi pengurusan STR.

c. Belum memiliki STR.

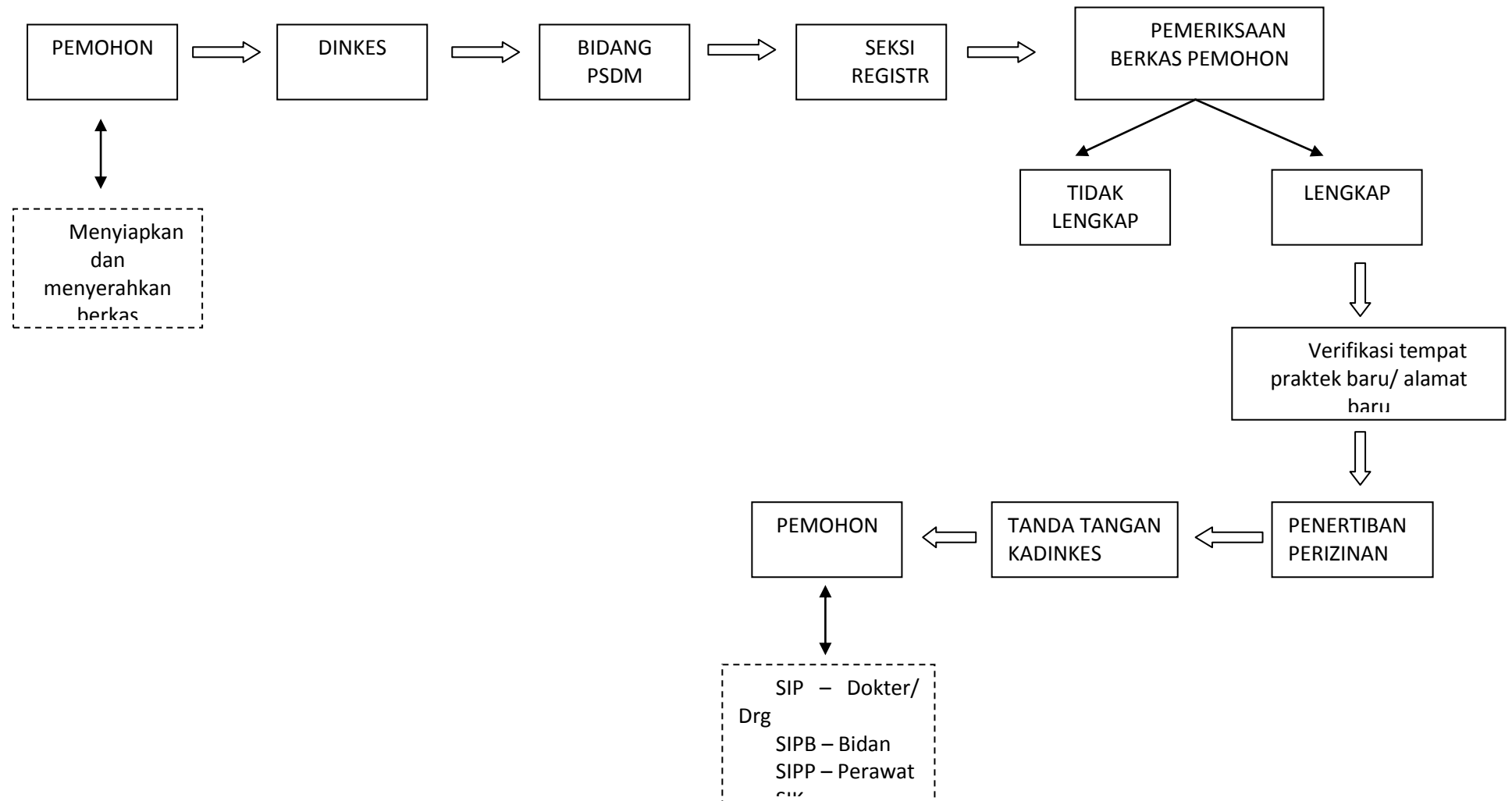
Dalam pengurusan STR, seorang dokter harus melengkapi persyaratan – persyaratan yang ada seperti; harus lulus uji kompetensi dan atau mendapat rekomendasi dari Organisasi Profesi IDI. Jika seorang dokter belum memiliki STR maka secara langsung dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) juga akan terhambat.

2. Izin Sudah Tidak Berlaku.

a. Belum memperpanjang STR.

SIP tetap berlaku selama STR masih berlaku juga. Dalam memperpanjang SIP seorang dokter harus terlebih dahulu memperpanjang STR-nya. Sebagian besar seorang dokter belum memperpanjang STR dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau dikarenakan SKP (Satuan Kredit Partisipasi) masih kurang.

B.1 Bagan Alur Pengurusan Izin Tenaga Kesehatan



Berkas persyaratan pengurusan izin praktik Dokter, antara lain:³

- a. Fotocopi KTP;
- b. Fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi bagi pemohon SIP baru;
- c. SK pengangkatan (CPNS/PNS/PTT) bagi Tenaga Medis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- d. Fotocopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
- e. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari Direktur/ penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- f. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
- g. Surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan/ Pejabat yang berwenang bagi Tenaga Medis yang telah memperoleh tempat praktik di luar Kabupaten Pasuruan;
- h. Surat Rekomendasi Organisasi profesi IDI/PDGI;
- i. Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
- j. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memperoleh SIP;
- k. Surat pernyataan bersedia dilakukan visitasi tempat praktik bermaterai
- l. Melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) lama bagi yang akan memperpanjang SIP;
- m. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;

Dampak yang dapat ditimbulkan apabila praktik kedokteran tanpa STR atau SIP tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik atau

³ Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan

mental atau nyawa pasien maka terjadi malpraktik kedokteran, walaupun praktik kedokteran tersebut tidak bertentangan dengan standar profesi dan prosedur dan dilakukan atas *informed consent*.⁴ *Informed Consent* adalah suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan sebagai suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar dan rasional, setelah ia mendapat informasi yang dipahaminya dari dokter tentang penyakitnya⁵.

Dari pelanggaran kewajiban hukum administrasi menjadi tindak pidana dapat dilihat maksud pembentuk undang – undang yang membentuk tindak pidana ini, yakni sebagai upaya preventif untuk menghindarkan dokter atau dokter gigi dari malpraktik kedokteran. Sekaligus upaya preventif agar tidak terdapat korban akibat malpraktik kedokteran.⁶

Di Kabupaten Pasuruan kasus dokter yang melakukan praktik tanpa izin ini langsung ditangani oleh pihak Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi IDI Kabupaten Pasuruan, karena pada kasus yang hanya termasuk malpraktek etik, maka dokter tidak akan ditangani oleh pengadilan, melainkan cukup oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). Di mana MKEK-lah yg akan memberikannya sanksi. Di mana jika MKEK tidak dapat menanggulangi kasus ini, akan diteruskan ke P3EK (Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran). Polisi dalam hal ini memebantu melakukan mediasi terhadap dokter – dokter yang terjerat tindak pidana tersebut, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam hal peraturan, pemberian izin, dan kompetensi.⁷

⁴ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Malang: Bayumedia, 2007, hal. 154

⁵ Guwandi J., *137 Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, FKUI, Jakarta, 1990, hal. 1.

⁶ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

⁷ Hasil wawancara dengan Tutik Harumi selaku kepala seksi registrasi dan akreditasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 17 September 201

B. Upaya Penindakan Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan.

Banyaknya Dokter praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik di Kabupaten Pasuruan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pengguna layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai unit kerja pemerintah daerah yang mengatur standar layanan kesehatan yang bermutu dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan sebagai organisasi profesi yang mengawasi para anggotanya agar menjalankan kode etik kedokteran dengan baik, sangat mempunyai peran besar dalam menindak dokter – dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik tersebut.

Berdasarkan penelitian, data lapang yang diperoleh mengenai upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Meditasi oleh Organisasi Profesi IDI.

Pembinaan dilakukan oleh Organisasi Profesi IDI untuk memberikan penjelasan tentang peraturan izin praktik dokter secara detail, sedangkan meditasi dilakukan untuk membuka isi pikiran dan merenungkan bahwa pentingnya suatu izin praktik bagi seorang dokter, serta memberi pengertian bahwa melakukan praktik tanpa memiliki izin adalah perbuatan melanggar hukum negara yang berakibat sanksi terberat di kemudian hari.⁸

2. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan.

Selain pembinaan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi IDI, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan juga memberikan pembinaan secara pribadi tentang peraturan izin praktik dokter yang harus dipatuhi dan dipahami.⁹

3. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan.¹⁰

a. Teguran secara lisan.

⁸ Hasil wawancara dengan Wily selaku sekretariat IDI, pada tanggal 17 September 2013

⁹ Hasil wawancara dengan Nanik Kunaini selaku staff di bidang PSDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 17 September 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tutik Harumi *Op.Cit.*

Teguran secara lisan disampaikan kepada seorang Dokter yang tidak memiliki izin praktik, dengan diberikan jangka waktu 1 sampai 2 minggu untuk mengurus izin praktik tersebut.

b. Teguran tertulis.

Teguran tertulis diberikan kepada seorang Dokter karena tidak menghiraukan teguran secara lisan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pemberian teguran secara lisan ataupun tertulis ini merupakan salah satu bentuk pemberian sanksi administratif oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) ke tempat Praktik.¹¹

BINWASDAL dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan untuk memantau, memonitoring dan memberikan pembinaan serta pengendalian terhadap pelaksanaan izin praktek.

- Mekanisme BINWASDAL

BINWASDAL merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang dilakukan secara berkala oleh tim BINWASDAL, melalui:

1. Pertemuan dan koordinasi dengan forum komunikasi organisasi profesi.
2. Kunjungan lapangan dan supervise.

5. Organisasi Profesi tidak memberikan rekomendasi untuk melengkapi SIP. Rekomendasi dari organisasi profesi IDI merupakan salah satu persyaratan untuk melengkapi pengurusan SIP, dengan kata lain apabila organisasi profesi IDI tidak memberikan rekomendasi maka pengurusan izin dokter tersebut tertunda selama organisasi profesi IDI belum memberikan rekomendasi tersebut.¹² Dengan kata lain Organisasi Profesi IDI sudah memberikan sanksi terhadap dokter yang praktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasil wawancara dengan Wily *Op.Cit.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

6. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktik.

Seorang dokter dilarang melakukan aktivitas pelayanan kesehatan selama belum mempunyai izin praktik.¹³ Dinas kesehatan telah berupaya memberikan sanksi terhadap dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

7. Pencabutan Rekomendasi oleh Organisasi Profesi IDI.

Dicabut rekomendasinya yang diberikan oleh organisasi profesi IDI melalui sidang yang dilakukan khusus.¹⁴ Seperti halnya pencabutan izin praktik sanksi ini diberikan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Tindak pidana praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik (SIP), pada dasarnya bermula dari pelanggaran hukum administrasi kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi kedokteran yang diberi ancaman pidana. Jadi, sifat melawan hukum perbuatan dalam tindak pidana tersebut terletak pada pelanggaran hukum administrasi.¹⁵

Apabila ditinjau dari teori penegakan hukum dari segi faktor kebudayaan, seharusnya dalam hukum pidana harus lebih mengutamakan nilai ketertiban daripada nilai ketentraman. Namun dilihat dari realita kasus yang ada, nilai ketentraman yang lebih diutamakan dari nilai ketertiban, hal ini sudah menjadi budaya hukum yang berlaku di Kabupaten Pasuruan dalam kasus seperti ini. Akibat budaya hukum yang ada di Kabupaten Pasuruan seperti yang telah dijelaskan di atas, tentunya hal ini juga berkaitan dengan faktor berikutnya yaitu faktor penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum tidak bisa tegas dalam melakukan tindakan terhadap dokter praktik

¹³ Hasil wawancara dengan Tutik Harumi *Op.Cit.*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal 149

tanpa memiliki surat izin praktik tersebut. Aparat penegak hukum hanya bisa melakukan mediasi kepada dokter praktik tanpa surat izin praktik dan melakukan koordinasi dengan pihak dinas kesehatan ataupun organisasi profesi dibandingkan melakukan upaya penegakan hukum secara pidana. Dimana upaya penegakan hukum tersebut seharusnya memberikan efek jera bagi para dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik.

C. Kendala atau Kesulitan yang Terjadi dalam Penindakan Terhadap Dokter yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan.

Dalam pelaksanaan penindakan terhadap Dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik terdapat kendala yang cukup menghambat.

1. Dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan pembinaan dari Organisasi Profesi.

Dokter yang bersangkutan tidak mengerti arti pentingnya pembinaan bagi dirinya, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan baik pembinaan yang dilakukan oleh organisasi profesi atau pembinaan intern yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak direspon dengan baik, dokter yang bersangkutan cenderung bersikap acuh.¹⁶

2. Waktu yang berbenturan.

Waktu dilaksanakannya pembinaan berbenturan dengan kesibukan dokter yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tidak banyak dokter yang dapat menghadiri pembinaan tersebut.¹⁷

3. Dokter kurang merespon tentang penjelasan peraturan izin praktik dokter. Meskipun telah mengikuti pembinaan, namun dalam prosesnya tidak memberikan banyak perubahan terhadap perilakunya. Hal tersebut dikarenakan ketika proses pembinaan berlangsung, dokter yang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Teguh Budi selaku kepala seksi sarana pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 17 September 2013

¹⁷ Hasil wawancara dengan Lia Azka selaku dokter anggota organisasi profesi IDI Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 17 September 2013

bersangkutan terkesan tidak menghiraukan proses pembinaan yang berlangsung.

4. Tidak memenuhi panggilan Meditasi.

Dokter yang bersangkutan menghiraukan undangan dari organisasi profesi IDI untuk melakukan meditasi, biasanya hal ini dikarenakan dokter tersebut tidak aktif dalam pertemuan organisasi profesi.¹⁸

5. Dokter tidak ada di tempat praktik saat BINWASDAL dilaksanakn.

BINWASDAL biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja (siang hari), sedangkan biasanya dokter praktik pada waktu pagi dan sore hari. Jadi saat tim Dinas Kesehatan melakukan kunjungan lapangan tidak dapat bertemu secara langsung dengan dokter yang bersangkutan, dikarenakan dokter tidak ada ditempat atau ada kesibukan lainnya.¹⁹

6. Dokter tersebut bukan atau belum menjadi anggota organisasi profesi IDI. Dikarenakan dokter yang bersangkutan bukan atau belum menjadi anggota organisasi profesi IDI, maka sulit untuk berkomunikasi dan sulit memperoleh informasi antara organisasi profesi IDI dan dokter tersebut.

7. Dokter tetap menjalankan praktek secara diam – diam.

Meskipun oleh pihak Dinas Kesehatan telah dilakukan penutupan tempat praktik, dokter yang bersangkutan tetap menjalankan praktek secara diam – diam.²⁰ Dengan demikian dokter tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan no. 2052/Menkes/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran serta melanggar kode etik kedokteran.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Teguh Budi *Op.Cit.*

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tutik Harumi *Op.Cit.*

²⁰ Hasil wawancara dengan Nanik Kunaini *Op.Cit.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya – upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam melakukan penindakan terhadap Dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik adalah:
 - a) Pembinaan dan Meditasi oleh organisasi profesi IDI.
 - b) Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan.
 - c) Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan
 - d) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (BINWASDAL) ke tempat praktik.
 - e) Organisasi profesi IDI tidak memberikan rekomendasi untuk melengkapi Surat Izin Praktik (SIP)
 - f) Pencabutan izin dan penutupan tempat praktik.
 - g) Pencabutan rekomendasi oleh organisasi profesi IDI.

Pada kasus yang hanya termasuk malpraktik etik, maka dokter tidak akan ditangani oleh pengadilan, melainkan cukup oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dimana MKEK-lah yang akan memberikan sanksi. Jika MKEK tidak dapat menanggulangi kasus ini, akan diteruskan ke Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK).

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam melakukan penindakan terhadap dokter praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik adalah:
 - a) Dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan pembinaan dari organisasi profesi.
 - b) Waktu yang berbenturan.
 - c) Dokter kurang merespon tentang penjelasan peraturan izin praktik dokter.
 - d) Dokter yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan meditasi.
 - e) Dokter tidak ada di tempat pratik saat BINWASDAL dilaksanakan.
 - f) Dokter tersebut bukan atau belum menjadi anggota Organisasi Profesi.
 - g) Dokter tetap menjalankan praktik secara diam – diam.

B. Saran

1. Dokter dan dokter gigi harus mengetahui peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang izin praktik kedokteran agar dapat mengetahui dan memahami kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan praktik kedokteran serta dapat mengetahui segala konsekuensi apabila melaksanakan praktik kedokteran tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya seharusnya dalam melakukan pelayanan medis disesuaikan dengan wewenang yang dimilikinya dengan terus meningkatkan profesionalisme dan kecakapan serta mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.
3. Pihak kepolisian seharusnya lebih mengoptimalkan kinerjanya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi IDI Kabupaten Pasuruan dalam melakukan penindakan terhadap dokter yang melakukan praktik tanpa izin tersebut.
4. Pihak kepolisian diharapkan lebih tegas dalam melakukan tindakan, dalam hal ini menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan maksud, untuk meminimalisir adanya dokter yang melakukan praktik tanpa izin atau praktik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- Adami Chazawi, **Malpraktik Kedokteran**, Bayumedia, Malang, 2007.
- Bambang Poernomo, **Hukum Kesehatan**, Aditya Media, Yogyakarta, 2000.
- Endang Kusuma Astuti, **Perjanjian Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Guwandi J., **137 Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*)**, FKUI, Jakarta, 1990.
- Hendrik, **Etika dan Hukum Kesehatan**, EGC, Jakarta, 2010.
- Soekidjo Notoatmodjo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Triana Ohoiwutun, **Bunga Rampai Hukum Kedokteran**, Bayumedia, Malang, 2008.
- Veronica komalawati, **Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik**, Citra aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Wila Chandrawila Supriadi, **Hukum Kedokteran**, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Standar Kompetensi Dokter Indonesia**, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2012.
- Majelis Kehormatan Etik Indonesia (MKEK) dan Ikatan Dokter Indonesia, **Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia**, Fakultas Kedokteran USU, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang – undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan.

Internet:

<http://somalus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/>

<http://danialprasko.blogspot.com/2011/04/definisi-dokter.html>

<http://budi399.wordpress.com/2010/11/22/standar-profesi/>